

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu kotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan jarak $\pm$ 39 km. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 desa. Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan dengan UU nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Gunungkidul juga merupakan daerah yang kaya dengan potensi ekonomi berbasis objek wisata. Pengunjung objek wisata pantai di Gunungkidul dari tahun 2012-2013 mengalami kenaikan sekitar 67,5 persen. Pada tahun 2013-2014 bertambah sekitar 28,67 persen (Statistik Daerah Kab. Gunungkidul: 2015; 25).

Tren peningkatan kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sumber ekonomi potensial yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul. Meskipun hingga saat ini Pendapatan Domestik Regional (PDRB) Kabupaten Gunungkidul masih didominasi sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai penyumbang kontribusi ketiga.

Dalam mewujudkan tujuan reformasi di Indonesia, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, antara lain ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perubahan – perubahan mendasar tersebut telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk maksud tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pembaharuan dan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut berisi dan menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah segenap unsurnya untuk segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya. Sejalan dengan maksud tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyempurnakan Peraturan Menteri DalamNegeri (Pemdagri) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 Pemendagri tersebut memuat pedoman dalam penerapan Sistem Akuntansi Keungan Daerah (SAKD), dimana SAKD sudah menggunakan metode pencatatan double entry dengan sistem akuntansi berbasis kas yang selanjutnya dimodifikasian mengarah kepada basis akrual (accrual basis), sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut (Nofria, Melsi. 2008. :4-5)

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Content pelaporan, keakurasian angka-angka yang

tertera di laporan keuangan dan dihasilkan melalui sistem akuntansi yang memadai dengan pengendalian yang baik. Dengan demikian laporan keuangan menjadi transparan, relevan, reliabel dan tepat waktu sangat didambakan, yang sangat berguna. Untuk itu perlunya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang memadai (Yuhertiana, 2006 dalam Darmawan, Cecep, (2008:12).

Dalam suatu pemerintah daerah memerlukan suatu system akuntansi keuangan yang bertujuan untuk mengatur dan mengetahui bagaimana pengolahan suatu anggaran yang diberikan oleh daerah kepada SKPD. Sistem adalah seperangkat elemen yang saling bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem harus memiliki organisasi, keterkaitan, integrasi, dan tujuan utama. Setiap bagian dari sistem disebut sebagai subsistem. Subsistem apapun dalam suatu sistem dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian atau subsistem baru.

Pentingnya Sistem Informasi Akuntansi bagi pemerintah daerah adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta memberikan output berupa informasi ke pada pemerintah daerah. Sistem informasi akuntansi memfasilitasi fungsi operasional pemerintah daerah dan mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah dengan menyediakan informasi yang dapat pimpinan daerah yang gunakan untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintah daerah.

Di Gunungkidul memiliki beberapa SKPD yang membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program pada berbagai bidang. System akuntansi keuangan pada kabupaten Gunungkidul sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sejak 2016 dengan menggunakan system yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Gunungkidul yaitu [V@l.id](#) SIPKD. Sistem ini dibuat untuk memproses mencatat dan melaporkan hasil dari

penggunaan anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh SKPD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang kemudian akan dievaluasi dan pengambilan keputusan oleh Bupati Gunungkidul mengenai hasil dari laporan keuangan tahunan tersebut.

Dalam hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yang merupakan salah satu SKPD yang bergerak dalam bidang sosial. Pada pandemic *covid-19* ini SKPD yang terjun langsung kelapangan bertemu dengan masyarakat untuk membagikan dana sosial dari pemerintah pusat adalah Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul. hal tersebut membuat peneliti ingin mengetahui lebih lanjut seberapa jauh kepatuhan dan kesesuaian sistem akuntansi keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dalam pelaporan atas kegiatan yang dijalankan.

Penelitian serupa yang diteliti oleh Zarzani yaitu tentang Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada SKPD Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data kuisisioner/angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Reliabilitas yang terdiri dari Uji Normalitas dan Pengujian Hipotesis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji one sampel test menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh belum optimal (75,7%) namun cukup relative baik, sedangkan penulis meneliti bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yang sedang berjalan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan saat ini dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang telah diterapkan di Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah?

1.3. Batasan Masalah

Banyak hal yang menyebabkan dinas pemerintah daerah mengalami masalah dalam pencatatan serta penyajian laporan keuangan. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul). Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui metode sistem akuntansi keuangan daerah apa yang diterapkan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti.
 - b. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.
2. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam sistem akuntansi keuangan yang sedang berjalan. Dengan demikian akan memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah-masalah tersebut.
 - b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem akuntansi keuangan yang berjalan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori masing-masing variabel yang menjadi dasar penelitian dan rujukan kembali terhadap penelitian terdahulu yang sejenis, rumusan hipotesis penelitian, definisi operasional yang menjelaskan variabel terkait dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, populasi dan sampel jenis data dan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA

Bagian ini berisi penjelasan data induk penelitian, diskripsi data, serta analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada SKPD pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul).

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan 2 bagian bab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian secara ringkas mengenai hasil dari pokok pembahasan/penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari peneliti yang ditujukan kepada objek yang diteliti serta saran bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S.2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astuti, Y. T., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Tahun 2013-2017. *Jurnal Optimal*, 17(1), 149-157.
- Bastian, indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Binawati, E. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana*, 18(1), 1-19.
- Binawati, E., & Susliyanti, E. D. (2020). Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis Akrua Dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Optimal*, 17(2), 20-37.
- Darmawan, Cecep. 2008. *Kiat Sukses Manajemen Rasulullah*. Yogyakarta: Khazzanah Intelektual.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi* Edisi keempat. Yogyakarta:Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nofria, Melsi. 2008. *Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman*. Malang: Tesis, PascaSarjana, Fak. Ekonomi, Univ. Diponegoro.
- Nordiawan, deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, deddi,dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta:Salemba Empat.

Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2006, Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).

Republik Indonesia, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

Rahmanurrrasyid, Amin. 2008. *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Pemerintahan yang Baik di Daerah*. Semarang: Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta IKAPI.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta IKAPI.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sutarman. 2017. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

